

SIARAN PERS

Webinar Forum Kajian Pembangunan “Bersaing di Pasar Tenaga Kerja: Angkatan Kerja Baru dan Tenaga Kerja Lulusan SMK pada Masa Pandemi COVID-19”

Jakarta, 14 Oktober 2021 — Melemahnya kinerja ekonomi selama pandemi COVID-19 berdampak pada menurunnya kemampuan dunia usaha untuk menyerap angkatan kerja di Indonesia. Pandemi berisiko memperpanjang waktu tunggu angkatan kerja baru, bahkan termasuk lulusan perguruan tinggi, untuk memperoleh pekerjaan.

Pandemi memperpanjang masa pencarian kerja bagi angkatan kerja baru

Studi yang dilakukan The SMERU Research Institute (SMERU) menemukan bahwa sebelum pandemi, setengah dari lulusan muda dalam studi ini berhasil mendapatkan pekerjaan dalam empat bulan, sementara saat pandemi dibutuhkan tujuh bulan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan.

Studi ini juga menemukan bahwa variabel usia mempunyai pengaruh signifikan terhadap perolehan kerja pada masa pandemi. “Lulusan baru berusia lebih tua memiliki posisi lebih baik dalam pasar kerja dan memiliki kesempatan yang lebih besar dan lebih cepat untuk memperoleh pekerjaan di saat pandemi,” ujar Lia Amelia (peneliti SMERU).

Pemerintah perlu membuat program lanjutan dari kegiatan pelatihan

Diperlukan kebijakan untuk memulihkan kondisi ketenagakerjaan yang menyasar lulusan baru pada masa pandemi. “Pemerintah perlu menyempurnakan implementasi program Kartu Prakerja yang memberikan pelatihan, pendampingan, dan konseling khusus bagi lulusan baru yang minim atau belum berpengalaman kerja,” ujar Lia Amelia. Pemerintah juga perlu mengevaluasi efektivitas program pelatihan dan pendampingan dengan mendata alumni pelatihan yang berhasil mendapatkan pekerjaan. Hal ini perlu dilakukan secara berkala untuk mengetahui area mana saja yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas program yang diberikan.

Sementara itu, angkatan kerja lulusan SMK memiliki tantangannya sendiri untuk masuk ke pasar kerja. Informasi Pasar Kerja (IPK) yang diamanatkan melalui Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dalam UU Cipta Kerja merupakan wacana kebijakan penting untuk membantu angkatan kerja baru agar terserap ke dalam pasar tenaga kerja di Indonesia.

Informasi pasar kerja belum secara optimal dimanfaatkan oleh pemberi kerja dan pencari kerja

Studi terbaru yang dilakukan oleh SMERU menemukan bahwa penyebab terbatasnya lowongan kerja adalah banyaknya pemberi kerja yang belum masuk ke dalam IPK. Perusahaan besar belum memanfaatkan Karirhub-Sisnaker karena sudah memiliki sistem rekrutmen untuk tenaga operator. “Mereka masih nyaman menggunakan sistem yang ada saat ini, yaitu lembaga pelatihan kerja atau lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) dan LPK,” ujar Palmira P. Bachtiar (peneliti senior SMERU). Oleh karena itu, LPTKS dan LPK perlu didorong untuk masuk ke dalam Karirhub-Sisnaker.

Di sisi lain, para pencari kerja lulusan SMK masih mengeluhkan kesenjangan digital dan berbagai hambatan literasi digital. “Survei telepon yang dilakukan terhadap 1.016 pekerja, pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), dan pencari kerja lulusan SMK di Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bandung menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka masih belum bisa membedakan lowongan asli dan palsu. Sehingga mereka masih mengirim CV ke lowongan palsu,” ujar Palmira P. Bachtiar.

Media sosial sebagai tahapan transisi menuju digitalisasi informasi pasar kerja

Dalam upaya memperbaiki Karirhub-Sisnaker agar bisa menjadi IPK yang inklusif, pemanfaatan media sosial sangat penting. Platform ini disukai oleh pencari kerja dan pengantar kerja di daerah. Pemanfaatan media sosial dapat dioptimalkan untuk mengintegrasikan pencari kerja ke dalam sistem IPK. “Selama masa transisi dari sistem manual ke digital, ada potensi munculnya lowongan kerja palsu. Kami merekomendasikan agar pengantar kerja perlu melakukan verifikasi terhadap lowongan kerja yang terindikasi palsu” ujar Palmira.

Di tingkat nasional, Karirhub-Sisnaker sebaiknya menjadi agregator platform yang dibuat oleh pemerintah daerah dan pihak swasta. Di tingkat daerah, Sistem Antarkerja sudah saatnya didigitisasi. Yang terakhir dan sangat penting adalah para pengantar kerja di Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota. Mereka adalah pihak yang menerapkan IPK dan memberikan konseling bagi pekerja yang ter-PHK dalam kerangka JKP. Oleh karena itu, perlu dipikirkan peningkatan kapasitas dan pemberian insentif bagi mereka.

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi:

<p>Ratri Indah Septiana Kepala Bidang Komunikasi The SMERU Research Institute rseptiana@smeru.or.id 08161361514</p>

Materi presentasi para pembicara dapat diunduh di: <https://smeru.or.id/id/content/bersaing-di-pasar-tenaga-kerja-angkatan-kerja-baru-dan-tenaga-kerja-lulusan-smk-pada-masa>

Tentang The SMERU Research Institute

SMERU adalah lembaga independen yang melakukan penelitian dan kajian kebijakan publik. Sejak didirikan pada 2001, SMERU telah menjadi lembaga terdepan dalam melakukan kajian di bidang kemiskinan dan ketimpangan. Informasi lebih lanjut tentang SMERU dapat dilihat di www.smeru.or.id.